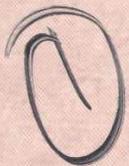


TH. III / 02 / 2000

ISSN ; 1410 - 7171



PUBLIKASI FE UNTAR

Studi Pengembangan Manajemen dan Akuntansi

ANALISIS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) SELURUH PROPINSI INDONESIA TAHUN 1996-1997 SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI KELAYAKAN PENERAPAN RENCANA OTONOMI DAERAH

↳ Budi Manggala

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL TERHADAP INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)

↳ Grace Widjaya

KONSEP "QUALITY MANAGEMENT SYSTEM" ISO 9000

↳ Hendro Lukman

"EXCELLENT" SYSTEMS ANALYSTS: THE SINGAPORE CONTEXT
(RINGKASAN ARTIKEL DARI M. GORDON HUNTER DAN JOHN BECK,
BESERTA KOMENTARNYA)

↳ Kery Soetjipto

MISSING VALUE DALAM ANALISIS DATA

↳ Lerbin R. Artonang R.

POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TAHUN 2000

↳ Matias Zakaria

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

↳ Yuniarwati

PENGARUH PERLAKUAN SELISIH KURS TERHADAP KINERJA SAHAM
(SURVEY PADA 11 PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA, 1999)

↳ Marcellinus Wendra

PENERAPAN AKUNTANSI INFLASI TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

↳ Rudy Setiawan

SKALA PRIORITAS KEBIJAKAN EKONOMI DALAM MENUNJANG
RECOVERY EKONOMI INDONESIA

↳ Kurniati W. Andani



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

ANALISIS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) SELURUH PROPINSI INDONESIA TAHUN 1996-1997

SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI KELAYAKAN PENERAPAN RENCANA OTONOMI DAERAH

Budi Manggala*

Abstract

Independence of the regional autonomy could be successful if only each region has competitive advantage in Gross Regional Domestic Product (GRDP), which means the bigger GRDP in quantity one region has, the more successful possibility to be independent one region when the policy of regional autonomy will be implemented in the future.

This article will analyze the level of GDP from all provinces in Indonesia in order to calculate the percentage of GRDP from each province compared to Indonesia's GDP as a whole. The result will determine each province readiness to be independent economically.

Permasalahan

Kekuatan utama dalam sistem otonomi daerah adalah kemampuan asli masyarakat daerah dengan ditunjang potensi yang dimilikinya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Sifat ketergantungan keuangan dari pusat yang yang secara historis diterapkan oleh penguasa Orde Baru selama tiga puluh dua tahun akibat dari pilihan dan penerapan kebijakan ekonomi yang sentralistik, langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kemandirian masing-masing daerah.

Ada beberapa kalangan pengamat ekonomi baik secara lembaga maupun perseorangan yang pesimis terhadap keberhasilan penerapan otonomi daerah di Indonesia yang secara efektif akan dilaksanakan pada tahun 2001. Misalnya. *Consultative Group on Indonesia* (CGI) sebagai lembaga dan negara donor untuk Indonesia merasa khawatir seandainya otonomi daerah dilaksanakan akan terjadi desentralisasi perilaku-perilaku negatif (distorsi ekonomi) dari perilaku Orde Baru yang sentralistik. Artinya akan terjadi desentralisasi korupsi, desentralisasi ineffisiensi, dan perilaku distorsi ekonomi lainnya(Kompas,2000).

Latar Belakang dan Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

Penerapan otonomi daerah di masa awal kemerdekaan lebih mengutamakan peran dan tujuan politis daripada peran dan tujuan administratif serta ekonomi. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pejabat daerah pada waktu itu kurang mempunyai kemampuan (*skill*) untuk mencapai tujuan-tujuan administratif dan ekonomis dari keberadaan pemerintah tersebut. Kurangnya kemampuan profesionalisme dan kuatnya ide-ide politis telah menyebabkan terjadinya ineffisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Peristiwa ini merupakan gejala umum di Indonesia pada masa itu. Jabatan-jabatan penting yang tadinya dipegang oleh pejabat-pejabat pemerintah Belanda digantikan oleh pejabat-pejabat Indonesia yang kurang memiliki potensi dan pengalaman serta keahlian yang memadai, tetapi kuat dalam ide-ide politik. Hal ini telah menyebabkan rendahnya kinerja (*performance*) birokrasi pemerintah baik di tingkat lokal (daerah) maupun di tingkat nasional.

Pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama), jabatan struktural pemerintahan lebih didominasi oleh para politisi-politisi daripada para profesional Hal ini terjadi karena selain sumber daya manusia yang mempunyai kualitas dan kemampuan administratif relatif masih sedikit juga faktor politik berdasarkan kepartaian yang berbasis nasionalisme, agama,

* Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

dan komunis (Nasakom) saling bersaing memperebutkan jabatan-jabatan struktural dari tingkat Menteri hingga Kepala Daerah.

Pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru), jabatan-jabatan struktural pemerintahan lebih didominasi oleh kalangan militer dan sipil yang merupakan loyalis dan beratribut satu partai/ormas yaitu Golkar. Posisi-posisi jabatan struktural pemerintahan diisi oleh orang-orang yang merupakan simpatisan dan loyalis partai Golkar sebagai alat penguasa Soeharto dalam melanggengkan kekuasaannya. Artinya di sini hanya ada satu suara aspirasi yaitu Golkar. Aspirasi yang tidak sinkron dengan Golkar akan berada di luar struktural birokrasi.

Dari pendekatan historis ini, isu sentral yang dapat ditarik adalah bagaimana pemerintah pusat selalu berusaha memegang kendali dan mengontrol daerah melalui figur kepala daerah yang didudukkan sebagai alat pusat dalam melanggengkan kekuasaan penguasa. Kekuatan *bargaining position* pusat dalam penentuan kepala daerah ini telah mendorong loyalitas kepala daerah yang lebih tinggi kepada pusat dibandingkan dengan daerahnya.

Aspek positif dari kebijakan ini adalah adanya kepastian bahwa program atau pun arahan pusat akan terlaksana secara aman di daerah. Pada saat-saat awal kemerdekaan, kekuatan ini sangat berguna untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang masih sangat rawan pada waktu itu (tujuan integratif). Aspek negatifnya adalah pada diri kepala daerah akan dihadapkan pada situasi untuk memilih antara kepentingan pusat dan daerah. Daerah selalu dituntut oleh pemerintah pusat agar mengemukakan loyalitas sedangkan masyarakat di daerah dihadapkan pada masalah tuntutan akuntabilitas.

Potensi Pendapatan Asli Daerah

Ada tidaknya iklim ekonomi yang kondusif di daerah yang dapat memacu pembangunan daerah merupakan dasar penilaian besar potensi ekonomi suatu daerah. Tabel 1 di bawah ini, menunjukkan seberapa besar potensi ekonomi dari masing-masing propinsi di Indonesia berdasarkan perolehan pendapatan asli daerahnya.

Tabel 1
Prosentase Peranan PAD terhadap APBD Dati I seluruh Indonesia
Menurut RAPBN Tahun 1999/2000 (Dalam Milyar rupiah)

Daerah Tingkat I	APBD	PAD	%
DI. Aceh	153.739	48.681	31,66
Sumut	413.073	204.570	49,52
Sumbar	158.503	56.958	35,93
Riau	317.686	94.110	29,62
Jambi	116.755	31.600	27,06
Sumsel	271.494	101.002	37,2
Bengkulu	97.449	19.125	19,62
Lampung	181.137	74.697	41,23
DKI Jakarta	2.793.000	1.721.145	61,61
Jabar	885.180	537.717	61,74
Jateng	703.677	385.451	54,77
Yogyakarta	139.742	62.802	44,94
Jatim	875.804	550.033	62,80
Bali	202.314	120.917	54,76

Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seluruh Propinsi Indonesia...

Kalbar	167.280	49.087	29,34
Kalteng	182.600	23.500	12,86
Kalsel	161.275	48.895	30,31
Kaltim	291.055	82.737	28,42
Sulut	125.971	23.462	18,62
Sulteng	136.035	25.918	19,05
Sulsel	255.772	94.374	36,89
Sultra	106.733	11.641	10,90
NTB	115.184	24.381	31,16
NTT	123.525	21.851	17,68
Maluku	133.134	19.902	17,68
Irian Jaya	289.922	25.352	14,96

Sumber : Econit.

Proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlihat bahwa yang di atas 50% adalah lima daerah tingkat I, yaitu Propinsi Jawa Timur yang mengandalkan sektor industri, memiliki kemampuan terbesar dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

Empat daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) terbesar yaitu, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya, justru mempunyai kemampuan yang rendah untuk menggali potensi daerahnya. Inilah yang disebut ‘kaya tetapi miskin’, artinya bahwa sumber daya alamnya sangat berpotensi tetapi pengolahannya masih sangat minim. Peranan PAD terhadap APBD dari keempat daerah tersebut masing-masing hanya 31,66%, 29,62%, 28,42%, dan 14,96%. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa selama ini pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung kepada pusat. Peranan PAD terhadap APBD di daerah-daerah tersebut juga menunjukkan rendahnya kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan.

Perkembangan Penanaman Modal Asing di Daerah

Untuk menghadapi tantangan perekonomian yang sedang berlangsung baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, daerah-daerah di Indonesia masih harus melawan kendala-kendala klasik seperti ketimpangan regional antar wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian Timur. Dari tabel 2 terlihat bahwa konsentrasi investasi, terutama investasi modal asing masih terpusat di wilayah Indonesia bagian Barat, khususnya di pulau Jawa.

Tabel 2
Perkembangan Nilai PMA dan PMDN di Indonesia menurut Lokasi
(Dalam Miliar rupiah)

Daerah	1995		1996		1997		1998	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDA	PMA
Jawa	41.807,1	27.492,0	43.710,4	17.911,0	63.681,0	20.535,0	18.871,5	10.840,4
Sumatera	13.075,0	5.464,0	24.095,5	4.297,7	33.562,0	11.163,7	10.669,4	1.415,7
Kalimantan	8.075,0	1.649,3	18.432,4	2.873,6	13.936,0	1.056,1	11.966,6	722,7
Sulawesi	2.710,8	2.384,4	6.272,9	2.552,6	3.849,9	426,1	13.022,9	192,7
Bali,NTT	1.525,8	328,6	805,9	1.765,0	2.073,2	129,3	2.093,1	365,7
Maluku, Irian, Tim-Tim*	2.355,3	2.595,4	7.398,1	2.771,6	2.771,6	522,3	4.125,8	25,9
Total	69.853,0	39.914,7	100.715,2	29.931,1	119.873,7	33.832,5	60.749,3	13.563,1

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS)

Data diolah

* Sebelum referendum

Terlihat bahwa pada periode tahun 1995 sampai dengan tahun 1998, perkembangan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Investasi dalam bentuk PMA, secara keseluruhan mengalami penurunan dalam waktu satu tahun terakhir yaitu berkisar 59,91%. Begitu pula dengan nilai investasi dalam PMDN yang menurun 49,32% dari tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan antara daerah Jawa dan luar Jawa, selama empat tahun terakhir mengalami perkembangan yang berbeda. Nilai PMBN untuk daerah luar Jawa mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, yaitu dari 40% pada tahun 1995 menjadi 52% pada tahun 1998, sedangkan nilai PMA untuk daerah luar Jawa mengalami penurunan dari 31% pada tahun 1995 menjadi 20% pada tahun 1998.

Kondisi sebaliknya terjadi pada daerah Jawa. Untuk nilai PMDN selama empat tahun terakhir mengalami penurunan 12%, sedangkan nilai PMA justru mengalami peningkatan dari 69% pada tahun 1995 menjadi 79,9% pada tahun 1998. Tetapi secara agregat nilai investasi, naik PMDN maupun PMA masih terpusat dan berorientasi di daerah pulau Jawa. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata proporsi PMDN yang ditanam di Jawa 50,93% dan proporsi nilai PMA di daerah Jawa sebesar 67,30%.

Perumusan Masalah

Dari permasalahan di atas dapat dirumuskan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, secara ekonomi tergantung dari *competitive advantage* yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Artinya secara ekonomi makro tergantung dari besaran kuantitatif produk domestik regional bruto yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya daerah tersebut seandainya otonomi daerah akan dilaksanakan.

Dalam artikel ini, akan dianalisis tingkat produk domestik regional bruto dari seluruh propinsi di Indonesia kemudian dilakukan studi komparasi dengan produk domestik bruto untuk menentukan prosentase PDRB masing-masing propinsi terhadap PDB Indonesia sehingga bisa diidentifikasi mandiri atau tidaknya suatu daerah secara ekonomi

Kerangka Teori dan Pembentukan Model

Menurut *Dornbusch dan Fischer (1992)*, perhitungan pendapatan nasional yang analog dengan produk domestik bruto pada skala nasional dan Produk domestik regional bruto pada skala daerah terdiri dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran (*production approach*), pendekatan pendapatan (*revenue approach*), dan pendekatan nilai tambah (*value added approach*).

Model perhitungan pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto yang digunakan dalam artikel ini adalah perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran secara matematis berbentuk fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(C, I, G, X, M)$$

Hubungan dari masing-masing variabel bebas yang terdiri dari konsumsi (C), Investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X), dan impor (M) terhadap variabel tak bebas pendapatan nasional (Y) dilihat dari besarnya *multiplier effect* dari masing-masing variabel bebas tersebut.

Dari model matematis di atas, dibentuk model ekonomi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PDRB} = & \beta_0 + \beta_1 \text{ Consumption} + \beta_2 \text{ Investment} + \beta_3 \text{ Government expenditure} + \\ & \beta_4 \text{ Eksport} + \beta_5 \text{ Import} + e \end{aligned}$$

Dari model tersebut, dilakukan perhitungan dengan bantuan komputer program Statistik SPSS.10.01 dan program Lindo.ver.6.

Hasil Perhitungan dan Pengolahan Data PDRB serta Interpretasinya.

Karena keterbatasan perolehan data sekunder regional, maka digunakan data tahun 1997 sebagai data *input* dalam perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) masing-masing propinsi dan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dari olah data diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3

PDRB 27 Propinsi dan PDB Indonesia tahun 1997

Propinsi	PDRB	PDB	Pertumbuhan (%)
1. DI Aceh	11.447.329	2,69	(0,14)
2. Sumatera Utara	24.842.860	5,84	4,76
3. Sumatera Barat	7.998.700	1,88	5,11
4. Riau	20.264.270	4,76	2,30
5. Jambi	3.268.452	0,77	3,91
6. Sumatera Selatan	14.072.706	3,31	4,08
7. Bengkulu	1.754.234	0,41	3,58
8. Lampung	7.199.301	1,69	4,12
9. Jakarta	69.479.433	16,32	5,01
10. Jawa Barat	71.164.122	16,72	4,28
11. Jawa Tengah	43.129.839	10,13	3,03
12. Yogyakarta	5.291.517	1,24	3,52
13. Jawa Timur	64.857.662	15,24	5,03
14. Bali	7.556.533	1,78	5,81
15. NTB	3.363.240	0,79	5,26
16. NTT	2.810.951	0,66	4,68
17. Timor timur	715.699	0,17	4,14
18. Kalimantan Barat	7.233.616	1,70	7,74
19. Kalimantan tengah	4.313.472	1,01	6,87
20. Kalimantan Selatan	6.293.905	1,48	5,66
21. Kalimantan Timur	20.637.526	4,85	4,27
22. Sulawesi Utara	3.767.016	0,89	5,38
23. Sulawesi Tengah	2.316.865	0,54	4,71
24. Sulawesi Selatan	9.893.420	2,32	4,30
25. Sulawesi tenggara	1.644.025	0,39	5,32
26. Maluku	3.083.747	0,72	3,44
27. Irian Jaya	7.244.542	1,70	4,31
Indonesia	425.644.982	100	4,33

Keterangan : Data *input* dari Biro Pusat Statistik, 2000

Data diolah dengan perhitungan didasarkan atas indeks harga konsumen tahun 1993

Dari hasil perhitungan dapat diinterpretasikan, bahwa dari 27 propinsi (keterangan: Propinsi Tim-Tim sebelum referendum) terlihat hanya ada 5 propinsi yang berlokasi di pulau Jawa (4 Propinsi) dan pulau Sumatera (1 Propinsi) yang tingkat PDRB-nya di atas rata-rata 50%. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau

Jawa. Lebih ironis lagi dari proporsi PDRB masing-masing propinsi terhadap PDB, teridentifikasi bahwa propinsi-propinsi yang sangat kaya sumber daya alamnya share PDRB hanya 6% dari PDB. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan pemerintah Pusat yang tidak proporsional/tidak adil terhadap masing-masing propinsi yang ada di Indonesia.

Kesimpulan

Dari hasil perhitungan proporsi PDRB dan PDB seluruh propinsi di Indonesia dengan data tahun 1997, dapat disimpulkan bahwa adanya ketimpangan secara ekonomi antara wilayah pulau Jawa dan wilayah di luar Pulau Jawa. Implikasi dari hasil perhitungan ini perlu dikaji dan menjadi bahan masukan dalam penerapan dan pelaksanaan Otonomi Daerah yang akan dimulai pada tahun 2001. Sebagai contoh kasus, ada persepsi yang tumpang tindih antara pemerintah daerah tingkat I dengan pemerintah daerah tingkat II, di mana saat ini ada beberapa aparat dan pejabatnya mempunyai persepsi yang beranggapan bahwa pemberian otonomi daerah berarti kesempatan untuk membagi proyek. Jika persepsi ini tidak dirubah berkaitan dengan adanya ketimpangan potensi secara ekonomi maka kemungkinan penerapan otonomi daerah tidak akan berjalan mulus tetapi justru akan menimbulkan konflik baru antara aparat/pejabat daerah dengan masyarakatnya yang dapat berkembang menjadi konflik antara masyarakat asli daerah dan masyarakat pendatang di mana *notabene* aparat/pejabat kebanyakan beretnis suku Jawa.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik, (2000) *PDRB menurut Penggunaan*

-----, (2000); *Produk Domestik Bruto Triwulan*

-----, (2000); *Indikator ekonomi Indonesia*

Dornbusch, R dan Fischer S, (1992) *Makro Ekonomi*, Jakarta, Erlangga

Kompas (2000), “*CGI Khawatirkan Desentralisasi Korupsi*” Jakarta, 2 November 2000

SPSS,Inc., SPSS User’s Guide, 7th ed. Chicago, 1999

Pyndyk,R.S. dan D.L. Rubinfield. 1987, *Econometric Models & Economic Forecasts*, 3rd ed,
New York: McGraw-Hill Publishing, Inc.